

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dengan studi kasus Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2014/PN.PTK. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU SPPA menekankan pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak, dengan menggunakan pendekatan double track system (pidana dan tindakan). Dalam kasus yang dikaji, hakim menjatuhkan pidana bersyarat dengan mempertimbangkan faktor usia, penyesalan pelaku, serta dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Temuan ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih mengutamakan upaya rehabilitasi dibandingkan dengan penghukuman yang bersifat represif. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik hukum pidana anak di Indonesia serta menekankan pentingnya penerapan pendekatan non-punitif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) in cases involving children who commit theft, using Case Decision No. 254/Pid.Sus/2014/PN.PTK as a case study. The research uses a qualitative approach with normative legal research methods, through literature review and analysis of court decisions. The findings indicate that the application of the Juvenile Justice Law emphasizes the principles of restorative justice and the protection of children's rights, employing a double-track system approach (criminal sanctions and rehabilitative measures). In the case examined, the judge imposed a conditional sentence, taking into account the offender's age, remorse, and social impact of the offense. These findings reinforce the notion that the juvenile justice system in Indonesia prioritizes rehabilitation over repressive punishment. This study contributes to the development of juvenile criminal law practices in Indonesia and highlights the importance of applying a non-punitive approach in handling children in conflict with the law.